

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI (TIDAK DI CATAT) TERHADAP
KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**NURUL NOFIYANTI
NIM : 10100112043**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Nofiyanti
NIM : 10100112043
Jurusan : Peradilan Agama
Fakultas : Syariah dan Hukum
Tempat/tgl. Lahir : Makassar 13, November 1993
Alamat : Jln. Abubakar Lambogo No.18
Judul Skripsi : Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatat)
Terhadap Kedudukan Harta Bersama Ditinjau dari
Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian ataupun seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Februari 2016

Penyusun,

NURUL NOFIYANTI
NIM : 10100112043

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. demikian pula salam dan shalawat penulis peruntukkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, sahabat – sahabat dan seluruh ahlul bait di dunia dan akhirat.

Dengan selesainya penyusunan Skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI (TIDAK DICATAT) TERHADAP KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN”**. Penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak. Karena sedikit atau banyaknya bantuan mereka, menjadikan penulis mewujudkan Skripsi ini. Berkenaan dengan itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya untuk papah dan bunda saya tercinta, **(Mahamuddin. L & Ibunda tercinta St.Hamidah S.E)**. adikku, serta keluargaku yang selama ini selalu memberikan motifasi dan doa sehingga adinda bisa menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar dan Segenap Pembantu Rektor yang memberikan kesempatan mengecap getirnya kehidupan kampus UIN, sehingga penulis merasa diri sebagai warga kampus insan akedimisi.
3. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. Supardin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.
5. Ibunda Dr. Hj. Fatimah, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. sekaligus pembimbing II penulis yang memberikan semangat dan masukan sehingga Skripsi dapat diselesaikan dengan baik.

6. Bapak Dr. H. M. Saleh Ridwam , M.Ag. selaku pembimbing I penulis tiada henti memberikan semangat dan masukan sehingga Skripsi dapat diselesaikan dengan baik.
7. Seluruh pegawai – pegawai tata usaha Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah memberikan pelayanan dengan baik sehingga penulis tidak menemukan kesulitan dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Serta seluruh teman-teman Peradilan Agama angkatan 2012.

Billahitaufiqwalhidayah

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 29 Februari 2016

Penulis

NURUL NOFIYANTI
NIM: 10100112043

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-14
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Pengertian Judul.....	9
D. Hipotesis.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN.....	15-48
A. Pengertian Perkawinan.....	15
B. Hukum Perkawinan.....	20
C. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	23
D. Tujuan Perkawinan.....	26
E. Putusnya Hubungan Perkawinan.....	29
F. Kedudukan Harta Dalam Perkawinan.....	37
G. Tinjauan Umum Perkawinan Siri Menurut Islam.....	43
BAB III KONSEP PERKAWINAN SIRI DI INDONESIA.....	49-60
A. Kawin Siri Menurut Hukum Islam.....	50
B. Kawin Siri Menurut Undang-Undang.....	55

BAB IV	AKIBAT HUKUM KAWIN SIRI DAN KEDUDUKAN HARTA BERSAMA.....	61-68
	A. Akibat Hukum Kawin Siri.....	62
	B. Kedudukan Harta Bersama Kawin Siri.....	66
BAB V	PENUTUP.....	69-70
	A. Kesimpulan.....	69
	B. Implikasi penelitian.....	70
	DAFTAR PUSTAKA.....	71
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75



ABSTRAK

Nama : Nurul Nofianti

Nim : 10100112043

Judul : Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Di Catat) Terhadap Kedudukan Harta Bersama Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Tujuan Penelitian ini adalah untuk: 1) Bagaimana konsep Perkawinan Siri (Tidak Dicatat) menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan? 2) Bagaimana akibat hukum Perkawinan Siri terhadap kedudukan harta Bersama?

Dalam menjawab hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian pustaka atau *library reseach* dengan pendekatan yang digunakan adalah hukum normative serta perbandingan hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran berbagai literatur atau refrensi baik dari buku maupun media online. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu Reduksi Data, Penyajian, dan Pengambilan kesimpulan.

Setelah mengadakan beberapa kajian terhadap Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatat) Terhadap Kedudukan Harta Bersama Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan dapat disimpulkan menjadi: 1) Perkawinan Siri (Tidak Dicatat) menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, dalam hukum Islam kawin siri tetap sah dimata agama apa bila syarat dan rukun terpenuhi diantara kedua belah pihak. Lain halnya dengan Undang-Undang Perkawinan yang secara jelas telah mengatur aturan pernikahan dalam artian pencatatan pernikahan dan secara hukum positif/Undang-Undang perkawinan, kawin siri tidak sah karena tidak terdaftar dalam pencatatan perkawinan/pernikahan, 2) Akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan harta bersama, Jika dilihat dari RUU nikah siri atau Rancangan Undang-Undang Hukum Materil oleh Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang akan memidanakan pernikahan tanpa dokumen resmi atau biasa disebut dengan kawin siri, sehingga dalam kedudukan harta bersama Negara tidak berhak mengatur pembagiannya dikarenakan tidak tercatatnya dalam pencatatan pernikahan, namun dalam pembagian harta bersama tetap bisa terlaksana dengan syarat membuat kesepakatan dalam pembagiannya hartanya.

Implikasi penelitian ini adalah: 1) Menghendaki adanya pengawasan terhadap perkawinan sehingga tidak terlalu banyak terjadinya perkawinan siri, meskipun dalam hukum Islam di pandang tetap pernikahan yang sah namun di mata hukum kita tidak sah, 2) Penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada masyarakat agar mengerti betapa pentingnya pernikahan yang secara legal sebab akan berdampak pada masa depan mereka yang akan menikah/kawin nantinya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataannya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bias diterima masyarakat, perkawinan sering kali tidak dihargai kesakralannya. Pernikahan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga. Pernikahan adalah satu-satunya ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum agama.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang populer di kalangan masyarakat, yaitu kawin siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti ‘kawin bawah tangan’, ‘kawin siri’ atau ‘nikah sirri’, adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam). Istilah *sirri*

berasal dari bahasa arab *sirra*, *israr* yang berarti rahasia. Kawin siri, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia.¹

Perkawinan yang berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.² Hal ini sejalan dengan al-Qur`an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam QS Az-Zariyat/51:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah swt.”³

Perkawinan menurut hukum Islam yang sesuai dengan landasan filosofis Perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam pasal 1 UU RI No.1 Tahun.1 1974 dengan mengkaitkan Perkawinan berdasarkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis itu dipertegas dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berisi :

¹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet ke VIII (Jakarta : Hidakarya agung, 1979), h. 176.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta PT Gramedi Pustaka, 2008), h.456.

³Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Cet. I; Bandung: Syamsil al-Qur'an, 2012), h. 522.

1. Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah.
2. Melaksanakan Perkawinan adalah Ibadah.
3. Ikatan Perkawinan bersifat miitsaaqan gholiidhan(ikatan yang kokoh).

Dalam landasan filosofis itu dirangkum secara terpadu antara Akidah, Ibadah, dan Muamallah.⁴

Dengan kata lain, kawin itu tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Kawin itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah.⁵

Pernikahan merupakan sebuah ritual sakral yang menjadi tempat bertemunya dua insan yang saling mencintai, tanpa ada lagi batasan yang menghalangi. Meskipun demikian, banyak pula orang-orang atau pihak-pihak yang saat ini berusaha untuk memanfaatkan ritual tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan, baik berupa materi maupun sekedar untuk mendapatkan kepuasan seks saja, atau juga karena alasan-alasan lain. Berbagai permasalahan pun akhirnya timbul.

Nikah siri adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di negara Indonesia. Memang, masalah nikah siri ini sangat sulit untuk

⁴Abdullah Kelib, *Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden no 1 tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional*- Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 16 Januari 1993.

⁵Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Sampai dengan pasal 9 yang mengatur tentang Pencatatan Perkawinan. *Pelanggaran Ketentuan Peraturan Pemerintah ini telah diatur dan dituangkan dalam Pasal 45. Lihat Saidus Syahar, Undang-undang Perkawinan dan masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari segi Hukum Islam*(Bandung : Alumi, 1981), h. 22.

dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut.

Biasanya, nikah siri dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja. Pernikahan ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu KUA (bagi yang muslim) atau Kantor Catatan Sipil setempat (bagi yang nonmuslim) untuk dicatat.

Sebagai contoh kita bisa menyaksikan tayangan *infotainment* di salah satu stasiun TV swasta nasional. Ketika itu, selebriti yang disoroti adalah Machicha Mochtar yang mengharap pengakuan Moerdiyono (Mensesneg di era Orde Baru) sebagai bapak dari putranya. Anak dari hasil pernikahan siri mereka yang kini telah berusia 12 tahun. Kemudian masih dalam program yang *infotainment* juga, dikabarkan tentang Bambang Triatmojo (putra alm. Pak Harto) yang tak mau mencantumkan namanya sebagai ayah di atas akte kelahiran putri Mayangsari. Lagi-lagi karena mereka ‘hanya’ nikah siri.

Berkembang pro kontra pendapat di masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa orang yang melakukan pernikahan siri, maka suami isteri tersebut tidak memiliki hubungan pewarisan. Artinya, jika suami meninggal dunia, maka isteri atau anak-anak keturunannya tidak memiliki hak untuk mewarisi harta suaminya. Ketentuan ini juga berlaku jika isteri yang meninggal dunia.

Melihat makin maraknya fenomena nikah siri, pemerintah berkeinginan untuk memberikan fatwa hukum yang tegas terhadap pernikahan siri. Sebagaimana penjelasan Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama, RUU ini akan memperketat pernikahan siri, kawin kontrak, dan poligami.⁶

Alasan Melakukan Pernikahan Siri:

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan sehingga tidak dicatatkan tetapi tidak dirahasiakan; belum cukup umur untuk melakukan perkawinan secara negara; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya. Ada juga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Bagi yang takut diketahui masyarakat, perkawinannya tidak dicatatkan dan dirahasiakan.

⁶Nasaruddin Umar mengatakan, Presiden SBY telah menyetujui diajukannya Rancangan Undang - Undang Peradilan Agama tentang Perkawinan (RUUPAP) yang mengatur sejumlah perkara yang belum ada dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Diantaranya hukum perkawinan bawah tangan atau nikah siri, perkawinan kontrak dan hukum waris untuk ahli waris kaum perempuan. Mengenai nikah siri, menurut Nasaruddin, siapapun yang menikahkan atau menikah tanpa dicatatkan dikenai sanksi pidana 3 bulan penjara dan denda Rp 5 juta. Sedangkan penghulu yang menikahkannya mendapat sanksi pidana 1 tahun penjara. Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang menikahkan tanpa syarat lengkap, juga diancam denda Rp 6 juta dan 1 tahun penjara. Lihat <http://suara-islam.com>, 22 June, 2009, UUP Dalam Bahaya!

Fatwa MUI : Nikah Siri Sah menurut hukum Islam. Sebagian masyarakat berpendapat nikah siri atau nikah di bawah tangan tidak sah. Sebagian lain mengatakan sah. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa. Nikah siri sah dilakukan asal tujuannya untuk membina rumah tangga. “Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudharat atau dampak negatif.

Fatwa tersebut merupakan hasil keputusan ijtima’ ulama Se-Indonesia II, di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur yang berlangsung 25-28 Mei 2006. Ia menjelaskan, nikah siri adalah pernikahan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. Namun demikian, “Perkawinan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah ataupun hak waris. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut sering kali menimbulkan sengketa. Sebab tuntutan akan sulit dipenuhi karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah. Namun demikian untuk menghindari kemudharatan, peserta ijtima’ ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang.⁷

⁷Arisuparli, *Nikah Sirih Sah Apabila Syarat dan Rukun Terpenuhi* (6 Oktober 2013), <https://arisuparli.wordpress.com/2013/10/06/nikah-siri-sah-apabila-sarat-dan-rukun-nikah-tearpenuhi/> (15 Mei 2015).

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara agama saja atau hanya di depan pemuka agama. Persoalan mengenai perkawinan siri memang masih menimbulkan pro dan kontra. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya istilah perkawinan siri serta tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan siri dalam sebuah peraturan. Namun, secara umum, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Bagaimana status perkawinan siri dimata Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukumnya terhadap istri yang dinikahi dan anak yang dilahirkan serta harta kekayaannya di dalam perkawinan siri, merupakan masalah yang diteliti dalam tulisan ini.

Perkawinan siri menurut Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan jenis ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan. Sedangkan akibat hukum terhadap istri, istri bukan merupakan istri sah dan karenanya tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami serta tidak berhak atas harta gono-gini dalam hal terjadi perpisahan. Terhadap anak, statusnya menjadi anak luar kawin dan karenanya ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta sewaktu-waktu ayahnya dapat

menyangkal keberadaan anak tersebut, selain itu ia tidak berhak atas nafkah hidup, biaya pendidikan, serta warisan dari ayahnya.⁸

Bila dikembalikan pada hukum perkawinan Islam maka selagi perkawinan telah dilakukan memenuhi syarat dan rukunnya, Perkawinan itu adalah sah dan berhak atas ketentuan yang digariskan dalam hukum perkawinan Islam seperti hubungan hukum antara istri dan suami, anak dan kedua orangtuanya, pewarisan serta penyelesaian bila terjadi perceraian atau bila salah satu dari suami atau isteri meninggal dunia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan diatas, maka pokok masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu berkaitan dengan “Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatat) Terhadap Kedudukan Harta Bersama Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah dan jelas, maka penyusun membagi dalam sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum Perkawinan Siri terhadap kedudukan harta Bersama?

⁸Kesimpulan penelitian Ananda Mutiar, *Perkawinan Siri di Mata Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukumnya terhadap isteri dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri* (Jakarta: UI Pres, Tesis, 2008), th.

C. Hipotesis

Berdasarkan kajian pustaka secara umum, maka jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Menurut Hukum Islam, apapun bentuk dan model perkawinan, sepanjang telah memenuhi rukun dan syaratnya maka perkawinan itu dianggap sah, sementara menurut Hukum Perkawinan Indonesia selain sah menurut agama dan kepercayaannya, suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum bila dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu di KUA bagi Muslim dan KCS bagi non Muslim.
2. Perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangganya. Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah, secara yuridis suami/isteri dan anak yang dilahirkannya tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Isteri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.

D. Pengertian Judul

Agar tidak ada kesalah pahaman dalam memahami maksud judul skripsi ini, maka ada beberapa kata yang perlu diberi penjelasan sebagai berikut:

1. Studi adalah penelitian ilmiah; kajian; telaahan. Yang dimaksud dalam skripsi ini adalah telaahan

2. Perkawinan Siri adalah Perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan Undang-undang perkawinan atau dikenal dengan istilah lain seperti 'kawin bawah tangan' atau nikah agama, yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (PPN). Yang berada di KUA bagi yang beragama Islam.
3. Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, yakni berupa fiqih, fatwa ulama dan yurisprudensi.

E. *Kajian Pustaka*

Sejak dulu sampai sekarang, kajian tentang perkawinan ini sudah banyak dibicarakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya hasil karya para ulama dan intelektual tentang perkawinan. Adapun yang menjadi beberapa rujukan dalam kajian pustaka yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Fiqh Munakahat, Oleh Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Buku ini menyajikan pembahasan yang komprehensif tentang seluk beluk pernikahan dalam Islam; peminangan (khitbah), syarat dan rukun Nikah, Mahar dan kafa'ah (persamaan) dalam pernikahan Islam; keharaman terjadinya pernikahan ; Batalnya pernikahan (fasakh); hak dan kewajiban suami istri; perwalian; putusnya pernikahan (talak); akibat putusnya pernikahan; masalah rujuk dan iddah. Disertai pula dalil-dalil dan ijtihad para fuqaha' (ahli fiqh).

2. Tiga Kategori Hukum, Oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. dan Dr. H. Mujaar Ibnu Syarif, M.Ag. Buku ini menjelaskan 3 kategori hukum: syariat, fikih, dan kanun, yang didahului dengan uraian singkat tentang Al`qur`an dalam kaitanya dengan hukum dan *ulil amri* serta dilengkapi dengan pembahasan mengenai *siyasa Syar`iyyah* yang memungkinkan *umara* melahirkan *Qanun/qawanin* (peraturan perundang-undangan) yang islami. Buku ini sedikit banyaknya membantu peneliti untuk mengembangkan penelitian dikemudian hari.
3. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Oleh Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. Buku ini banyak membahas masalah Hukum Perdata Islam yang digunakan di Indonesia saat ini. Khususnya masalah perkawinan dan khususnya lagi masalah hak dan kewajiban suami-istri. Sehingga membantu peneliti memahami hukum kekeluargaan lebih banyak.
4. Adapun karya tulis dalam bentuk skripsi yang penulis tinjau atas nama Ananda Mutiara, 2008, Perkawinan Siri di Mata Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukumnya terhadap isteri dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri, tesis S2, UI. Karena perkawinan jenis ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan. Sedangkan akibat hukum terhadap istri, istri bukan merupakan istri sah dan karenanya tidak berhak atas nafkah dan

warisan dari suami serta tidak berhak atas harta gono-gini dalam hal terjadi perpisahan. Terhadap anak, statusnya menjadi anak luar kawin dan karenanya ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta sewaktu-waktu ayahnya dapat menyangkal keberadaan anak tersebut, selain itu ia tidak berhak atas nafkah hidup, biaya pendidikan, serta warisan dari ayahnya.

Selain dari buku diatas, penulis juga mempersiapkan beberapa rujukan yang lain, seperti undang-undang Perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini. Sehingga penulis dapat dan mampu memaparkan skripsi ini nantinya.

F. Metodologi Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian perpustakaan (library reseach) yaitu meneliti, mengumpulkan, dan menganalisa dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang tersedia diperpustakaan, guna menggali data dan teori yang mendukung pembahasan ini. Penelitian ini penelitian Hukum Normatif karena merupakan perbandingan Hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer berupa studi kepustakaan yang bersumberkan kepada hadits-hadits (hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, Bukhari dan Muslim), fiqih-fiqih (buku Fiqih karangan Sayyid Sabiq, Ibnu Rusyid, Amir Syarifuddin, Satria Efendi), KHI dan Undang-undang Perkawinan, khususnya yang membahas tentang perkawinan.

b. Sumber Data Skunder.

Sumber data skunder adalah sumber data penunjang berupa studi kepustakaan yang bersumberkan kepada buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, naskah-naskah serta literatur lainnya yang dapat menunjang upaya penulis dalam memecahkan persoalan yang penulis angkatkan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mencatat data-data yang berkaitan dengan penelitian penulis dari sumber data primer dan sekunder kemudian data diolah sesuai dengan teknik analisis data.

4. Analisa Data

Analisa terhadap data yang penulis peroleh adalah dengan menggunakan analisis berupa:

- a. Induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dan menganalisa dengan bertolak dari data-data khusus ke data-data umum. Seperti kasus dalam membahas Perkawinan.

- b. Deduktif, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari keterangan dan pengetahuan yang bersifat umum berdasarkan keterangan umum itu penulis mengarahkannya kepada hal yang bersifat khusus.

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana konsep perkawinan siri (tidak dicatatkan) menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.
 - b. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan harta kekayaannya
2. Kegunaan

Dapat menambah Khasanah keilmuan bagi penulis, dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatat) Terhadap Kedudukan Harta Kekayaannya Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi Mahasiswa yang ingin mengkaji hal-hal lain yang mengenai perkawinan sirih dan kedudukan istri, harta, dan anak menurut pandangan hukum islam dan Undang-undang Perkawinan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa rahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Swt.¹

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.²

¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), h. 9.

²Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h. 298.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa Indonesia artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³

Perkawinan dalam bahasa Arab ialah “nikah”. Kata nikah berarti aqad atau perjanjian resmi yang menghalalkan pergaulan dan persetubuhan; perkawinan sah secara hukum.⁴

Kata nikah juga sering digunakan untuk arti bergabung; hubungan kelamin; dan juga berarti aqad.⁵

Penggunaan lafaz aqad untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan.

Perkawinan itu dibuat dalam bentuk aqad karena ia adalah peristiwa hukum dan bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.⁶

Menurut Dr. H. Abd. Kadir Ahmad, MS, Ed bahwa perkawinan dalam istilah agama Islam adalah nikah itu melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela. Keridhaan kedua belah pihak untuk

³Depdikbud, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456.

⁴Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009), h. 599.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2009), h. 36.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 38.

mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai Allah swt.⁷

Sementara Sulaiman Rasyid berpandangan bahwa perkawinan ialah aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

Sedangkan Prof. Dr. H. Mahmud Yunus berpendapat bahwa perkawinan ialah aqad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at.⁸

Lebih lanjut, Slamet Abidin dan Aminuddin dalam “Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim” mengemukakan beberapa pengertian perkawinan menurut pendapat para ulama mazhab :

- a. Ulama Hanafiyah mengatakan perkawinan sebagai aqad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan.
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah aqad dengan menggunakan lafaz nikah atau *zanj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

⁷Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* (Makassar: Indobis, 2006), h. 17.

⁸Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1985), h. 1

- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah aqad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama hanabilah menyatakan bahwa perkawinan adalah aqad dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengundang pengertian hak untuk memiliki melalui aqad nikah.⁹

Melihat pengertian perkawinan yang diberikan oleh ulama dan cendekiawan Muslim tampaknya hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan, yaitu kebutuhan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya aqad nikah untuk mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, bahwa perkawinan ialah Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹⁰

⁹Boedi Abdullah, Cs, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 18.

¹⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 9.

Sayyid Sabiq lebih lanjut mengomentari :

“Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.”¹¹

Dari beberapa pengertian yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perkawinan pada dasarnya adalah sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah swt.
2. Perkawinan pada manusia merupakan salah satu perintah agama kepada laki-laki dan perempuan yang mampu
3. Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau.
4. Perkawinan adalah aqad antara seorang calon mempelai pria dengan mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, tolong menolong serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing.

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 10-11.

B. Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah perbuatan yang diperintahkan Allah dan disuruh oleh Nabi saw. Banyak seruan Allah dan Nabi saw untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman Allah dalam QS An-Nuur/24: 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹²

Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi kelangsungan hidupnya. Karena itu agama Islam menganjurkan orang untuk segera menikah. Menikah adalah naluri hidup manusia, hal ini merupakan sebuah keharusan bahkan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sanggup melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Dalam hal itu, Nabi saw bersabda :

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: Syamsil al-Qur'an, 2012), h. 494.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخار)¹³

Artinya :

Hai para pemuda! Barang siapa yang telah sanggup untuk kawin, maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan mata dari yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk kawin, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.

Dalam ajaran Islam, perkawinan bukan sekedar hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan fitrah manusia dan sunnah Rasulullah saw yang mengacu pada niat seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

Al-Jaziry mengatakan bahwa :

Sesuai dengan keadaan orang yang akan melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya *wajib*, *haram*, *makruh*, *sunnat (mandub)* dan adakalanya *mubah*.¹⁴

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan yang merupakan aqad atau perjanjian yang menghalalkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya diharamkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu adalah *mubah*. Namun, dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnatullah, fitrah manusia dengan sunnah Rasulullah saw yang mengacu kepada niat seseorang melangsungkan perkawinan, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum

¹³Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari* (Mesir: Darul Fiqr, 1347 H), h. 3.

¹⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 17.

perkawinan itu hanya semata *mubah*. Oleh karena itu, hukum perkawinan berubah-ubah sesuai keadaan dan motif orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian, perkawinan dapat menjadi wajib manakala kedua mempelai sudah mampu secara fisik, materi dan mentalitas batiniahnya. Jika orang yang dengan kondisi ini tidak menikah, sedang nafsu seksualnya tidak dapat ditahan lagi, ia akan berdosa.

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka diantaranya dalam hal hukum nikah.¹⁵

Berbeda halnya dengan seseorang yang mampu secara lahiriah dan batiniah, tetapi ia mampu menahan nafsu seksualnya, maka menikah baginya hukumnya sunnah.

Adapun orang yang tidak memiliki kemampuan, baik kemampuan lahiriah maupun kemampuan batiniah (tidak mampu menunaikan kewajibannya terhadap istrinya, baik nafkah lahir ataupun nafkah batin), maka menikah baginya hukumnya haram, karena akan membahayakan hidup dalam berumah tangga.

¹⁵Indah Rezky Mulia, “Kedudukan Anak Perempuan Keturunan Sayyid yang Menikah dengan Laki-laki yang Bukan Sayyid terhadap Harta Warisan Orang Tua Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar”, h. 21. Lihat Skripsi, Irsyad Dahri, *Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Perkawinan Sayyid di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar* (Makassar: UIN Alauddin, 2015), h. 16.

Sedangkan seseorang yang hanya mengandalkan kemampuan seksualitasnya, akan tetapi secara ekonomi dan kemampuan materialnya masih nol, maka menikah baginya hukumnya makruh.

Sementara seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau alasan-alasan yang mengharamkan menikah, maka menikah baginya hukumnya *mubah*.

Dari beberapa hukum perkawinan yang bervariasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, tampak jelas bahwa perkawinan itu memerlukan kesiapan mental spiritual, kesiapan lahir dan batin. Karena perkawinan itu adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, diantaranya kewajiban membeli belanja rumah tangga, melindungi istri, hak waris, dan sebagainya. Sehingga menikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya, haram untuk se golongan tertentu, dan makruh untuk segolongan yang lain.

C. Syarat dan Rukun Perkawinan

Pada dasarnya perdebatan tentang syarat dan rukun nikah merupakan masalah yang serius di kalangan para ulama dan imam mazhab. Sehingga terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan yang manah yang tidak.

Bahkan terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan yang manah yang termasuk syarat.¹⁶

Menurut penelitian Khoiruddin Nasution, berkesimpulan bahwa tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi syarat dan rukun perkawinan. Ada memang beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan, namun jumlahnya ulama yang menyebut sangat sedikit (tidak mewakili).¹⁷

Namun terlepas dari istilah yang digunakan oleh ahli hukum Islam di atas, penulis dalam hal ini menggunakan istilah dan rukun syarat perkawinan yang diterima oleh sebagian besar ulama. Meskipun pada penempatannya berbeda-beda karena pada dasarnya perlunya pengaturan syarat dan rukun adalah untuk merealisasikan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, agar tujuan disyariatkannya perkawinan dapat tercapai.

Adapun rukun perkawinan yang disertai syarat-syarat tertentu tersebut, diantaranya yaitu;¹⁸

- a. Adanya calon suami atau mempelai laki-laki.
- b. Adanya calon isteri, atau calon mempelai perempuan

¹⁶Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-undang No.1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), cet. Ke-3, h. 60.

¹⁷Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*, (Hukum Perkawinan I) (Yogyakarta: Academia dan Tafazza, 2004), Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim, h. 27.

¹⁸Zainuddin bin 'Abd al-Aziz al-Malibary, Fath al-Mu'in bin Syarh al-Qalyubi (Semarang: Thoha Putra, t,th), h.99

- c. Adanya wali
- d. Ijab qabul
- e. Saksi nikah

Adapun undang-undang perkawinan menetapkan bahwa syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 s.d pasal 11 undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut¹⁹:

- a. Terdapat persetujuan kedua mempelai.
- b. Terdapat izin dari orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun
- c. Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan mempelai wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun
- d. Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah yang dilarang kawin.
- e. Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
- f. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau isteri yang sama, yang hendak dikawini.
- g. Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum masa tunggu berakhir.²⁰

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang rukun dan syarat perkawinan dalam pasal 14 yaitu dalam satu perkawinan harus ada:

¹⁹ Lihat Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, h.142-143

²⁰ Lihat Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, h. 142-143.

- a. Calon suami,
- b. Calon isteri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi,
- e. Ijab dan Kabul.²¹

D. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar dan legal. Agama Islam tidak membenarkan manusia hidup membujang. Karena pilihan hidup membujang tidak sejalan dengan kodrat dan naluriyah manusia yang normal. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan untuk melanjutkan keturunan dan yang mana merupakan kebutuhan esensial manusia.

Dalam QS. Adz Dzariyaat/51: 49 disebutkan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya :

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.²²

Perkawinan bagi manusia diatur oleh berbagai etika dan peraturan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, beradab dan berakhlak. Karena itulah perkawinan yang sarat nilai bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Agama Islam mengaturnya dengan baik

²¹Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 116-117.

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 756.

dan detail, dengan syarat-syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan dapat tercapai.

Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA mengemukakan bahwa :

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²³

Dr. H. Abdul Kadir Ahmad, MS, Ed menegaskan :

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, yaitu dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.²⁴

Prof. Dr. H. Mahmud Yunus bahwa :

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.²⁵

Sulaiman Rasyid mengatakan bahwa :

Tujuan terbesar dalam perkawinan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya.²⁶

Prof. Dr. Amir Syarifuddin berpendapat bahwa ada beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan, diantaranya adalah :

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan yang akan datang,

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 22.

²⁴ Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, h. 22.

²⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, h. 1

²⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1998), h. 375.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.²⁷

Keharmonisan suatu rumah tangga sangat ditunjang oleh lahirnya keturunan. Suami istri mendambakan lahirnya anak-anak dalam keluarga, karena belum lengkap kebahagiaan rumah tangga manakala dalam perkawinannya tidak memperoleh keturunan. Anak adalah penerus dan pewaris keluarga. Tanpa anak berarti tidak ada pelanjut kehidupan dan terputusnya sejarah keturunan manusia.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah sebagai upaya untuk memelihara kehormatan diri agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang terlarang. Memelihara kelangsungan kehidupan dengan lahirnya keturunan yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang antara suami istri yang saling menolong untuk kemaslahatan bersama, memenuhi petunjuk agama dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Dalam QS Ar Ruum/30: 21 dengan jelas menyebutkan :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 46-47.

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁸

E. Putusnya Hubungan Perkawinan

Perceraian dalam istilah ahli Figh disebut “*talak*” atau “*furqah*”. *Talak* berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan “*furqah*” berarti bercerai (lawan dari berkumpul). Lalu kedua kata itu dipakai oleh para ahli Figh sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami-isteri. Perkataan *talak* dalam istilah ahli Figh mempunyai dua arti, yakni arti yang umum dan arti yang khusus. *Talak* dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. *Talak* dalam arti khusus berarti perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Karena *talak* salah satu bentuk dari perceraian antara suami-isteri itu ada yang disebabkan karena *talak* maka untuk selanjutnya istilah *talak* yang dimaksud di sini ialah *talak dalam arti yang khusus*. Meskipun Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 21.

memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas – asas Hukum Islam. .

Adapun sebab-sebab putusnya hubungan perkawinan sebagai berikut:

1. Talak;

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan yang demikian tadi diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil, kemungkinannya daripada apabila hak talak diberikan kepada isteri. Di samping alasan ini, ada alasan lain yang memberikan wewenang/hak talak pada suami, antara lain:

- a. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak isteri waktu dilaksanakan akad nikah.
- b. Suami wajib membayar mahar kepada isterinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang mu'tah (pemberian sukarela dari suami kepada isterinya) setelah suami mentalak isterinya.
- c. Suami wajib memberi nafkah isterinya pada masa iddah apabila ia mentalaknya.
- d. Perintah-perintah mentalak dalam Al-Quran dan Hadist banyak ditujukan pada suami.

2. Khuluk

Talak khuluk atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami-isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau

uang dari pihak isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu. Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan khuluk ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan khuluk ini si isteri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan. Penebusan atau pengganti yang diberikan isteri pada suaminya disebut juga dengan kata “*iwald*”.

Syarat sahnya khuluk ialah:

- a. Perceraian dengan khuluk itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami-isteri.
- b. Besar kecilnya uang tebusan harus ditentukan dengan persetujuan bersama antara suami-isteri.

Apabila tidak terdapat persetujuan antara keduanya mengenai jumlah uang penebus, Hakim Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah uang tebusan itu. Khuluk dapat dijatuhkan sewaktu-waktu, tidak usah menanti isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, hal ini disebabkan karena khuluk itu terjadi atas kehendak isteri sendiri.

3. Syiqaq

Syiqaq itu berarti perselisihan atau menurut istilah Fiqh berarti perselisihan suami-isteri yang diselesaikan dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan yang satu orang dari pihak isteri.

Menurut Syekh Abdul ‘Aziz Al Khuli tugas dan syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi hakim adalah sebagai berikut:

- a. Berlaku adil di antara pihak yang berpekara.
- b. Dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami-isteri itu.
- c. Kedua hakam itu disegani oleh kedua pihak suami-isteri.
- d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya/dirugikan apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.

4. Fasakh

Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Biasanya yang menuntut fasakh di pengadilan adalah isteri. Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang isteri menuntut fasakh di pengadilan:

- a. Suami sakit gila.
- b. Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh.
- c. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin.
- d. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada isterinya.
- e. Isteri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami.
- f. Suami pergi tanpa diketahui tempat-tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.

5. Ta'lik talak

Arti daripada ta'lik ialah menggantungkan, jadi pengertian ta'lik talak ialah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan

dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu. Di Indonesia pembacaan ta'lik talak dilakukan oleh suami setelah akad nikah. Adapun sighat ta'lik talak yang tercantum dalam buku nikah dari Departemen Agama adalah sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- a. Meninggalkan isteri saya tersebut enam bulan berturut-turut;
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
- d. Atau saya membiarkan/tidak memperdulikan isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp sebagai 'iwald (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwald (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial. Talak satu yang dijatuhkan suami berdasarkan ta'lik, mengakibatkan hak talak suami tinggal dua kali, apabila keduanya kembali melakukan perkawinan lagi. Kalau kita perhatikan jatuhnya talak dengan ta'lik ini hampir sama dengan khuluk, sebab sama-sama disertai uang 'iwald dari pihak isteri. Sehingga talak yang dijatuhkan atas dasar ta'lik dianggap sebagai talak ba'in, suami boleh mengambil isterinya kembali dengan jalan melaksanakan akad-nikah baru.

6. Ila'

Arti daripada ila' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalangan bangsa Arab jahiliyah perkataan ila' mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak ditalak ataupun diceraikan. Sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak isteri karena keadaannya tekatung-katung dan tidak berketentuan.

Berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 226-227, dapat diperoleh ketentuan bahwa:

- a. Suami yang mengila' isterinya batasnya paling lama hanya empat bulan.
- b. Kalau batas waktu itu habis maka suami harus kembali hidup sebagai suami-isteri atau mentalaknya.

Bila sampai batas waktu empat bulan itu habis dan suami belum mentalak isterinya atau meneruskan hubungan suami-isteri, maka menurut Imam Abu Hanifah suami yang diam saja itu dianggap telah jatuh talaknya satu kepada isterinya. Apabila suami hendak kembali meneruskan hubungan dengan isterinya, hendaklah ia menebus sumpahnya dengan denda atau kafarah. Kafarah sumpah ila' sama dengan kafarah umum yang terlanggar dalam hukum Islam. Denda sumpah umum ini diatur dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89, berupa salah satu dari empat kesempatan yang diatur secara berurutan, yaitu:

- a. Memberi makan sepuluh orang miskin menurut makan yang wajar yang biasa kamu berikan untuk keluarga kamu, atau
- b. Memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau

c. Memerdekakan seorang budak, atau kamu tidak sanggup juga maka

d. Hendaklah kamu berpuasa tiga hari.

Pembayaran kafarah ini pun juga harus dilaksanakan apabila suami mentalak isterinya dan merujuknya kembali pada masa 'iddah atau dalam perkawinan baru setelah masa 'iddah habis

7. Zhihar

Zhihar adalah prosedur talak, yang hampir sama dengan ila'. Arti zhihar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan isterinya. Masa tenggang serta akibat zhihar sama dengan ila'. Ketentuan mengenai zhihar ini diatur dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 2-4, yang isinya:

- a. Zhihar ialah ungkapan yang berlaku khusus bagi orang Arab yang artinya suatu keadaan di mana seorang suami bersumpah bahwa bagi isterinya itu sama dengan punggung ibunya, sumpah ini berarti dia tidak akan mencampuri isterinya lagi.
- b. Sumpah seperti ini termasuk hal yang mungkar, yang tidak disenangi oleh Allah dan sekaligus merupakan perkataan dusta dan paksa.
- c. Akibat dari sumpah itu ialah terputusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri. Kalau hendak menyambung kembali hubungan keduanya, maka wajiblah suami membayar kafarahnya lebih dulu.
- d. Bentuk kafarahnya adalah melakukan salah satu perbuatan di bawah ini dengan berurut menurut urutannya menurut kesanggupan suami yang bersangkutan, yakni:
 - Memerdekakan seorang budak, atau

- Puasa dua bulan berturut-turut, atau
- Memberi makan 60 orang miskin.

8. Li'aan

Arti li'an ialah laknat yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Akibatnya ialah putusnya perkawinan antara suami-isteri untuk selama-lamanya.

Proses pelaksanaan perceraian karena li'an diatur dalam Al-Quran syrat An-Nur ayat 6-9, sebagai berikut:

- a. Suami yang menuduh isterinya berzina harus mengajukan saksi yang cukup yang turut menyaksikan perbuatan penyelewengan tersebut.
- b. Kalau suami tidak dapat mengajukan saksi, supaya ia tidak terkena hukuman menuduh zina, ia harus mengucapkan sumpah lima kali. Empat kali dari sumpah itu ia menyatakan bahwa tuduhannya benar, dan sumpah kelima menyatakan bahwa ia sanggup menerima laknat Tuhan apabila tuduhannya tidak benar (dusta).
- c. Untuk membebaskan diri dari tuduhan si isteri juga harus bersumpah lima kali. Empat kali ia menyatakan tidak bersalah dan yang kelima ia menyatakan sanggup menerima laknat Tuhan apabila ia bersalah dan tuduhan suaminya benar.
- d. Akibat dari sumpah ini isteri telah terbebas dari tuduhan dan ancaman hukuman, namun hubungan perkawinan menjadi putus untuk selama-lamanya.

9. Kematian.

Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami atau isteri. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak waris atas harta

peninggalan yang meninggal. Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun bagi isteri yang kematian suami tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Si isteri harus menunggu masa iddahnya habis yang lamanya empat bulan sepuluh hari.

F. Kedudukan Harta Dalam Perkawinan

1. Jenis harta dalam perkawinan

a. Harta Bawaan

Harta/barang bawaan adalah segala perabot rumah tangga yang dipersiapkan oleh isteri dan keluarga, sebagai peralatan rumah tangga nanti bersama suaminya.

Dalam hal barang / harta bawaan antara suami dan isteri, pada dasarnya tidak ada percampuran antara keduanya karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga dengan harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Sebelum memasuki perkawinan adakalanya suami atau isteri sudah memiliki harta benda. Dapat saja merupakan harta milik pribadi hasil usaha sendiri, harta keluarganya atau merupakan hasil warisan yang diterima dari orang tuanya. Harta benda yang telah ada sebelum perkawinan ini bila dibawa kedalam perkawinan tidak akan berubah statusnya. Pasal 35 ayat 2 UU RI nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Masing-masing berhak menggunakan untuk keperluan apa saja.

Kedua suami isteri itu menurut pasal 89 dan 90 Inpres nomor 1 tahun 1991 wajib bertanggung jawab memelihara dan melindungi harta isteri atau harta suaminya serta harta milik bersama. Jika harta bawaan itu merupakan hak milik pribadi masing-masing jika terjadi kematian salah satu diantaranya maka yang hidup selama menjadi ahli waris dari si mati. Kalau harta bawaan itu bukan hak miliknya maka kembali sebagai mana adanya sebelumnya. Kalau keduanya meninggal maka ahli waris mereka adalah anak-anaknya.

Sebenarnya yang bertanggung jawab secara hukum untuk menyediakan peralatan rumah tangga, seperti tempat tidur, perabot dapur dan sebagainya adalah suami. Sekalipun mahar yang diterimanya lebih besar daripada pembelian alat rumah tangga tersebut. Hal ini karena mahar menjadi hak perempuan sepenuhnya dan merupakan hak mutlak istri. Berbeda dengan pendapat golongan Maliki yang mengatakan bahwa mahar bukan mutlak bagi istri. Oleh karena itu, ia tidak berhak membelanjakan untuk kepentingan dirinya. Akan tetapi bagi perempuan yang miskin, ia boleh mengambil sedikit darinya dengan cara-cara yang baik.

“Dari ‘Ali RA. berkata: Rasulullah Saw. memberi barang bawaan pada Fatimah berupa pakaian, kantong tempat air yang terbuat dari kulit dan bantal berenda.”

Berkaitan dengan mahar, menurut kami mahar tetap sepenuhnya hak perempuan. Akan tetapi apabila si perempuan dengan kerelaan hatinya memberikannya kepada si laki-laki maka boleh bagi laki-laki tersebut menggunakan untuk dirinya.

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian. Jika mereka menyerahkan

kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (Q.S. An- nisa' : 4).²⁹

b. Harta Bersama Suami Istri

1) Pengertian

Pasal 85 KHI: "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri".

Pasal 35 ayat 2 UU RI nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama. Adapun harta bersama tersebut dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, benda berwujud atau benda tak berwujud, baik yang telah ada maupun yang akan ada pada saat kemudian. Hadiah, honor, penghargaan dan sebagainya yang diperoleh masing-masing pihak yang menyebabkan bertambahnya pendapatan yang ada hubungannya dengan profesi atau pekerjaan sehari-hari suami atau isteri menjadi harta milik bersama.³⁰ Sedang yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami atau istri tanpa persetujuan salah satu pihak tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tersebut.³¹

²⁹Lihat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

³⁰Abidin, *Harta Benda dalam Perkawinan* (01 Januari 2011), <http://abidinsuccesmen.blogspot.com/2011/01/makalah-harta-benda-dalam-perkawinan.html> (5 Desember 2015).

³¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1 Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h. 183.

Dalam hal pertanggung jawaban utang, baik terhadap utang suami maupun istri, bias dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedang terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Akan tetapi apabila harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan pada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, maka dibebankan pada harta istri.³²

Semua harta yang diperoleh sepasang suami isteri selama dalam perkawinan mereka menjadi harta benda kepunyaan bersama. Menurut pasal 1 huruf f Inpres nomor 1 tahun 1991 mengatakan bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atau diperoleh atas nama siapa, suami atau isteri.

Disamping Allah telah menjanjikan karunia-Nya yang banyak, tetapi tiap manusia mempunyai kewajiban untuk bekerja mengusahakan adanya penghasilan untuk memenuhi semakin banyaknya kebutuhan hidup, baik kebutuhan untuk masa kini dan persiapan untuk masa yang akan datang. Semua orang harus mencari harta benda sebanyak mungkin agar memperoleh kemulayaan yang banyak. Agar dapat memberi nafkah semua yang menjadi tanggung jawabnya. Juga untuk membantu orang lain yang wajib dibantu menurut jalan yang diridhai Allah. Tangan di atas (orang yang memberi) lebih mulia daripada tangan yang dibawah (orang yang

³²M. A. Tihami, *Fiqh Munakaha: Kajian fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 179.

menerima pemberian). Dalam hal mengumpulkan harta benda sebagai sarana untuk keperluan dunia agar selamat di akhirat kelak manusia harus selalu berusaha (ikhtiar).

Harta bersama tidak boleh terpisah atau dibagi-bagi selama dalam perkawinan masih berlangsung. Apabila suami isteri itu berpisah akibat kematian atau akibat perceraian barulah dapat dibagi. Jika pasangan suami isteri itu waktu bercerai atau salah satunya meninggal tidak memiliki anak, maka semua harta bersama itu dibagi dua setelah dikeluarkan biaya pemakamam dan pembayar hutang-hutang suami isteri. Jika pasangan ini mempunyai anak maka yang menjadi ahli waris adalah suami atau isteri yang hidup terlama dan bersama anak-anak mereka.

2) Penghasilan Istri dalam perkawinan

Salah satu tujuan perkawinan adalah mencari rezeki yang halal (mengumpulkan harta benda). Mengenai harta yang diperoleh selama dalam perkawinan ini tidak dipertimbangkan apakah yang mempunyai penghasilan itu suami atau isteri. Menurut peraturan perkawinan Indonesia nomor 136 tahun 1946 pasal 50 ayat 4 menetapkan bahwa: Apabila isteri bekerja untuk keperluan rumah tangga, maka semua harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama.³³

Menurut kami walaupun telah dijelaskan dalam sebuah hadits bahwa seorang wanita tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya sekalipun itu pergi untuk berjamaah ke masjid, akan tetapi perlu diketahui Islam adalah agama yang halus dan

³³Anonim, *Harta Benda* (05 Agustus 2014), http://www.islam-yes.com/harta_benda.htm#sthash.3Onq26Tv.dpuf. (12 Desember 2015).

selalu mengutamakan kemaslahatan ummatnya. Oleh karena itu menurut kami seorang istri yang bekerja diluar rumah untuk membantu penghasilan suaminya dalam mencapai kemaslahatan keluarganya tetap diperbolehkan selama tidak keluar dari atauran syara' dan diizinkan oleh suami. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah yang mana seorang perempuan bernama Saudah akan keluar rumah untuk memenuhi hajat hidupnya, kemudian mengadu kepada Nabi, dan Nabi bersabda :

"kamu kaum wanita telah diizinkan keluar untuk memenuhi keperluanmu."(Muttafaq Alaih)

Pada saat kebutuhan hidup yang selalu meningkat dengan harga semua barang yang makin melambung tinggi, kalau sifatnya darurat dapat saja para isteri bekerja di luar rumah bila diberi izin oleh suaminya, bila pekerjaan itu layak, sesuai dengan ajaran agama Islam dan sesuai pula dengan kodratnya sebagai wanita dalam rangka menunaikan kewajibannya sesuai dengan pasal 30 UU RI No. 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa sang isteri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

3) Harta Gono Gini

Dalam situs Asiamaya *gono -gini* didefinisikan sebagai harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, gonogini diartikan sebagai harta perolehan bersama selama bersuami isteri. Dalam *Kompilasi Hukum Islam* yang berlaku dalam lingkungan Pengadilan Agama, harta gono gini disebut dengan

istilah “harta kekayaan dalam perkawinan”. Definisinya (dalam pasal 1 ayat f) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Dikatakan juga harta gonogini adalah harta milik bersama suami istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami istri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta gono gini atau harta bersama. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian harta gono-gini yang disebutkan di dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, yaitu sebagai berikut :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. ”

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan harta gono gini adalah harta benda yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan dan menjadi hak kepemilikan berdua di antara suami istri.

G. Tinjauan Umum Perkawinan Siri Menurut Islam

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataannya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat. perkawinan seringkali tidak dihargai kesakralannya. Pernikahan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam satu rumah tangga. Pernikahan merupakan satu- satunya ritual pemersatu

dua insan yang secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum agama. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang populer dalam masyarakat, yaitu kawin sirri. Perkawinan yang tidak dicatat atau yang dikenal dengan berbagai macam istilah lain seperti ‘kawin bawah tangan’, ‘kawin sirri’, nikah sirri, adalah perkawinan yang berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatat di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, kantor catatan sipil bagi non-Muslim).³⁴

Istilah *sirri* dari bahasa Arab *sirra*, *israr* yang berarti rahasia. Kawin sirri, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Dengan kata lain, kawin itu tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah. Kawin itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah. Melihat maraknya nikah sirri, pemerintah berkeinginan memberikan fatwa hukum yang tegas terhadap pernikahan sirri. Sebagaimana penjelasan Nasaruddin Umar, Direktur Bimas Islam Depag, RUU ini akan memperketat pernikahan sirri, kawin kontrak, dan poligami.

Nikah siri atau juga disebut dengan nikah bawah tangan ini cukup banyak diperbincangkan sehingga terdapat berbagai pendapat mengenai nikah siri. Pendapat pertama yaitu nikah siri adalah nikah sembunyi-sembunyi, padahal menurut ajaran agama Islam, Rasulullah memerintahkan “awlim walau bi syatin” (umumkanlah

³⁴ Grup Syaria Metro, *Kumpulan Makalah Pendidikan Dan Tempat Berbagi Ilmu Pengetahuan* (2012), <http://grupsyariah.blogspot.co.id/2012/04/kajian-hukum-islam-tentang-hukum-nikah.html>. (5 Desember 2015).

pernikahanmu walau kau hanya memotong seekor anak domba kecil), menikah siri adalah menikah yang tidak dicatat di KUA, padahal dalam ajaran Islam menaati Allah, Rasul dan Pemerintah adalah suatu kewajiban. Pendapat kedua, nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam. Menurut Prof. Dr. Dadang Hawari (psikiater & Ulama) berpendapat bahwa “Telah terjadi upaya mengakali pernikahan dari sebuah prosesi agung menjadi sekedar ajang untuk memuaskan hawa nafsu manusia”, ia menilai pernikahan siri saat ini banyak dilakukan sebagai upaya legalisasi perselingkuhan atau menikah lagi untuk yang kedua kali atau lebih, sehingga menurutnya pernikahan siri ini tidak sah.³⁵

Dari tiga pendapat tentang nikah siri tersebut maka dapat didefinisikan bahwa nikah siri saat ini adalah nikah yang dalam prakteknya tidak dilaksanakan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam yang mana harus turut mematuhi peraturan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu setelah menikah secara agama atau adat harus pula dilakukan pencatatan di catatan sipil atau KUA sebagaimana telah diatur dalam UU RI No. 1 tahun 1974 pasal 2 (2) dan sebagaimana disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden R.I No. 1 tahun 1991) pasal 17 (1), sehingga saat ini nikah siri menjadi suatu pernikahan yang tidak sah secara agama maupun hukum di Indonesia. Alasan dari definisi tersebut adalah suatu pernikahan seperti nikah siri ini akan tetap sah kedudukannya

³⁵Grup Syaria Metro, *Kumpulan Makalah Pendidikan Dan Tempat Berbagi Ilmu Pengetahuan* (5 Desember 2015).

bila dilaksanakan sesuai rukun dan syarat sahnya, sebab lain halnya jika sampai saat ini hukum yang berlaku di Indonesia hanya hukum Islam yang ada, maka bagi siapapun yang menikah siri tidak akan mengalami kesulitan, karena tidak perlu diadakan pencatatan. Berhubung saat ini telah berlangsung ketentuan pemerintah yang juga telah disepakati oleh masyarakatnya, maka ketentuan tersebut wajib ditaati oleh masyarakat Indonesia sebagai masyarakat maju dalam suatu negara hukum.³⁶

Pernikahan sirri atau pernikahan tanpa pencatatan baik nikah tunggal maupun karena poligami, adalah pernikahan yang ilegal, Ini terjadi disebabkan kurangnya pemahaman hukum dan minimnya kesadaran hukum dari sebagian masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan mereka. Pernikahan di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum. pernikahan sirri merupakan perbuatan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum dalam sebuah Negara hukum bernama Indonesia. Oleh sebab itu masyarakat Islam Indonesia harus menghindari praktek perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri.³⁷

1. Analisis Hukum Nikah Sirri Menurut Ulama

a. Ulama klasik

Pernikahan yang dirahasiakan, menurut Imam Malik hukumnya batal. Sebab pernikahan wajib diumumkan kepada masyarakat luas. Sedang Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menilai, nikah sirri hukumnya sah, tapi makruh dilakukan.

³⁶Grup Syariah Metro, *Kumpulan Makalah Pendidikan Dan Tempat Berbagi Ilmu Pengetahuan* (5 Desember 2015).

³⁷Grup Syariah Metro, *Kumpulan Makalah Pendidikan Dan Tempat Berbagi Ilmu Pengetahuan* (5 Desember 2015).

b. Ulama Kontemporer

Sementara terkait nikah sirri, memang benar bahwa nikah tersebut pada dasarnya secara agama sah. Namun, pelarangan di sini juga tidak serta merta salah jika didasarkan pada kemaslahatan dan mudharat (bahaya) yang ada. Ini juga didukung oleh sejumlah dalil. Dr. Yusuf al-Qardhawi menyebutkan, "Jika pada sesuatu yang diperbolehkan terkandung hal-hal yang membahayakan manusia atau sebagian besar mereka, maka wajib dilarang (bersifat kondisional). Sebab Nabi saw bersabda, "Tidak boleh menimbulkan bahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Misalnya Umar Ibn al-Khattab pernah melarang lelaki muslim menikahi wanita ahlul kitab karena menimbulkan fitnah dan mudharat bagi wanita muslimah. Juga disebutkan beliau pernah melarang pemberian zakat kepada muallaf karena salah fungsi dsb.

2. Analisis Hukum Nikah Sirri Menurut Masailul fiqhiyah

Kaidah yang penulis gunakan adalah :

مَالَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya :

“tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib hukumnya.”

Berkaitan dengan penggunaan kaidah ini pada kasus nikah sirri yang tidak melalui proses pencatatan perkawinan, penulis berangkat dari anggapan bahwa pencatatan perkawinan adalah satu peraturan yang sengaja dibuat dalam rangka

menyempurnakan kualitas sebuah perkawinan. Penyempurnaan kualitas perkawinan ini berkaitan erat dengan status perkawinan yang merupakan bagian dari perintah Allah swt dalam rangka beribadah kepada-Nya. Karena tujuannya yang luhur itu, maka segala peraturan yang telah ada sebelumnya dalam kitab-kitab fiqh klasik dan peraturan yang muncul terkemudian wajib untuk diadakan. Dengan demikian, berlakulah ketentuan *mala yatimmu al-wajib illa bihi fahua wajib* “tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib hukumnya”. Artinya, tidak sempurna sebuah perkawinan kecuali dengan adanya pencatatan, maka adanya pencatatan menjadi wajib hukumnya.³⁸

3. Analisis Hukum Nikah Sirri Menurut Pendapat Penulis

Pengertian nikah sirri sekarang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, sementara pengertian pada zaman dahulu berkaitan dengan syarat atau rukun nikah yang wajib dipenuhi yaitu berupa persaksian atau pengumuman. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa nikah sirri sah menurut syari'at Islam, pernikahan semacam itu bisa halal dan bisa juga menjadi haram. Pernikahan sah dan halal apabila tidak menimbulkan korban atau kerugian baik kedua belah pihak. Namun demikian pernikahan yang sah bisa menjadi haram apabila menimbulkan korban.

³⁸Grup Syariah Metro, *Kumpulan Makalah Pendidikan Dan Tempat Berbagi Ilmu Pengetahuan* (5 Desember 2015).

BAB III

KONSEP PERKAWINAN SIRI DI INDONESIA

A. Kawin Siri Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah aqad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenis kelamin yang diatur oleh syari'at. Sedangkan pengertian dari ikah siri adalah nikah secara rahasia (sembunyi-semboyi). Disebut secara rahasia karena tidak dilaporkan ke kantor urusan agama atau KUA bagi muslim atau kantor catatan sipil bagi non muslim.

Biasanya nikah siri dilakukan karena dua pihak belum siap meresmikannya atau meramaikannya, namun dipihak lain untuk menjadi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.

Pendapat Imam Abu Hanifah, Yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA dengan tiga imam madzab lainnya. Beliau menetapkan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal (dalam kondisi normal) maka diperbolehkan memilih sendiri calon suaminya. Dia tidak hanya tergantung pada walinya saja. Lebih lanjut beliau menjelaskan wanita baligh dan berakal juga diperbolehkan aqad nikah sendiri baik dalam kondisi perawan atau janda.¹

Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturan

¹Yusep, *Makalah Lengkap Tentang Hukum Nikah Sirih Dalam Pandangan Hukum Kapita Slekta Hukum Islam* (24 April 2013), <http://iusyusephukum.blogspot.co.id/2013/04/makalah-hukum-nikah-sirih-dalam.html> (5 Desember 2015).

Allah Subhanallah. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak akan memilih tata cara yang lain.

Namun di masyarakat kita, hal ini tidak banyak diketahui orang. Kami akan mengungkap tata cara pernikahan sesuai dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang hanya dengan cara inilah kita terhindar dari jalan yang sesat (bidah).

Jelas tentang ajaran agamanya karena meyakini kebenaran yang dilakukannya. Dalam masalah pernikahan sesungguhnya Islam telah mengatur sedemikian rupa. Dari mulai bagaimana mencari calon pendamping hidup sampai mewujudkan sebuah pesta pernikahan.

Islam menghalalkan Kawin Siri jika syarat dan rukun nikah terpenuhi diantaranya:²

1. Syarat Nikah
 - a. Syarat calon pengantin pria sebagai berikut :
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Terang prianya (bukan banci)
 - 3) Tidak dipaksa
 - 4) Tidak beristri empat orang
 - 5) Bukan Mahram bakal istri
 - 6) Tidak mempunyai istri dalam yang haram dimadu dengan bakal isteri
 - 7) Mengetahui bakal istri tidak haram dinikahnya

²Arisuparli, *Nikah Sirih Sah Apabila Syarat dan Rukun Terpenuhi*, (5 Desember 2015).

- 8) Tidak sedang dalam ihram atau umrah. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَا يُنْكَحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

Artinya:

“Seorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah.” (HR. Muslim).

- b. Syarat calon pengantin wanita sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam
- 2) Terang wanitanya (bukan banci)
- 3) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya Hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Artinya:

“Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah/dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya.” (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 3458) Terkecuali bila si wanita masih kecil, belum baligh, maka boleh bagi walinya menikahkannya tanpa seizinnya.

- 4) Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
- 5) Bukan mahram bakal suami
- 6) Belum pernah dili’an (sumpah li’an) oleh bakal suami.
- 7) Terang orangnya
- 8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

2. Rukun nikah :

- a. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.

Di antara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan. Atau, si wanita sedang dalam masa iddahnya dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang muslimah.

- b. Adanya ijab,

yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali. Misalnya dengan si wali mengatakan, “Zawwajtuka Fulanah” (“Aku nikahkan engkau dengan si Fulanah”) atau “Ankahtuka Fulanah” (“Aku nikahkan engkau dengan Fulanah”).

- c. Adanya qabul,

yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya, dengan menyatakan, “Qabiltu Hadzan Nikah” atau “Qabiltu Hadzat Tazwij” (“Aku terima pernikahan ini”) atau “Qabiltuha.” Dalam ijab dan qabul dipakai lafadz inkah dan tazwij karena dua lafadz ini yang datang dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Azhab/33:37.

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا

Terjemahnya:

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya (menceraikannya), zawwajnakah¹ (Kami nikahkan engkau dengan Zainab yang telah diceraikan Zaid).”³

d. Adanya Wali

Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Dalam hadits disebutkan:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

Artinya:

“Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.” (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa’i)

Bila seorang wanita tidak memiliki wali nasab atau walinya enggan menikahkannya, maka hakim/penguasa memiliki hak perwalian atasnya dengan dalil sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِّنْ لَاَ وَلِيٍّ لَهُ

Artinya:

“Maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.” (HR. Abu Dawud).

³Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Cet. I; Bandung: Syamsil al-Qur’an, 2012), h. 422

e. Adanya dua orang saksi

Saksi adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu ‘anhuma: “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil.” (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa’i).

B. Kawin Siri Menurut Undang-Undang

UU Pernikahan No 1 tahun 1974 Pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Menikah dari segi bahasa berarti Ikatan/Simpul. Dari segi Syara’, nikah adalah suatu ikatan atau akad yang menghalalkan pergaulan dan pembatas hak dan kewajiban serta tolong-menolong diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Sedangkan tujuan menikah adalah menciptakan keluarga sakinah, mawadah, warahmah diharapkan lahir keturunan yang jelas nashabnya.⁵

Menikah dikatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Adapun rukun nikah diantaranya yaitu: adanya seorang laki-laki sebagai mempelai pria, dua orang saksi, wali pengantin perempuan, ijab qabul. Begitu sakralnya arti pernikahan

⁴Republik Indonesia, UU Pernikahan No 1 tahun 1974 Pasal 1

⁵Cipluk (Blogger), *Nikah Siri: Jalan Pintas Pengecut Para Maling* (8 Februari 2012), <http://cempebule.blogspot.co.id/2012/02/nikah-siri-jalan-pintas-pengecut-para.html> (5 Desember 2015).

bagi manusia, karena salah satu yang membedakan dengan binatang adalah pernikahan. Tak heran bila orang yang tidak menikah tapi melakukan tindakan seperti layaknya orang yang terikat tali pernikahan, akan mendapat sangsi sosial dan sangsi dari Tuhan berupa Dosa Besar.

Secara harfiah “sirri” itu artinya “rahasia”. Jadi, nikah sirri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak.⁶

Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan:

Pertama; pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat;

Kedua, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya.

Ketiga, karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Seperti terikat kontrak dalam pekerjaan misalnya ikatan dinas.

⁶Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet ke VIII (Jakarta : Hidakarya agung, 1979), h. 177.

Adapun hukum syariat atas ketiga fakta tersebut adalah sebagai berikut:⁷

1. Pernikahan Tanpa Wali

Adapun fakta pertama, yakni pernikahan tanpa wali. Sesungguhnya Islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa wali. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadits yang dituturkan dari sahabat Abu Musa ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali.” (Nailul Authar VI: 230 hadits ke 2648].

Makna semacam ini dipertegas oleh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Rasulullah saw pernah bersabda: “Wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil; pernikahannya batil; pernikahannya batil”. Dalam hal pengertian Nikah Siri (Kawin Rahasia) berarti perkawinan diam-diam tanpa saksi dan ini menurut kesepakatan Ahlul Ilmi dari kalangan Sahabat Nabi dan Tabi’in jelas tidak sah.

Nikah siri model ini biasanya dengan alasan karena tidak disetujui oleh wali pengantin perempuan, meskipun ada jalan keluarnya yaitu melalui wali hakim, tapi biasanya wali hakim yang paham dan bekerja sesuai dengan prosedur yang benar akan meminta surat pelimpahan wewenang dari wali yang sebenarnya dan meneliti dengan sebenar-benarnya penyebab pernikahan tersebut harus dilakukan.

⁷Cipluk (Blogger), *Nikah Siri: Jalan Pintas Pengecut Para Maling*, (5 Desember 2015).

2. Nikah Tanpa Dicatatkan di KUA atau Catatan Sipil

Fakta kedua, yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat dan telah memenuhi rukun nikah namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil atau sering disebut nikah di bawah tangan.

Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain yang dokumen resminya dikeluarkan oleh negara. Bukti ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum di hadapan majelis peradilan. Ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya bisa diselesaikan dengan mudah berdasarkan hukum positif.

Pernikahan yang tidak dicatat secara resmi oleh KUA atau Catatan Sipil banyak dilakukan pada jaman dulu. Mungkin kakek nenek kita pun mengalaminya. Tapi masalah rukun nikah dan disyarkan kepada umum tetap dilakukan. Misalnya dengan mengadakan kenduri mengundang tetangga sekitar. Alasan yang paling banyak ditemui adalah faktor biaya, keadaan darurat seperti perang, Enggan dengan prosedur pengurusan, dll.

Dalam UU Perkawinan, pasal 3 dinyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan demikian sebaliknya. Kalaupun pria tersebut hendak menikah lagi untuk yang kesekian kalinya, dalam pasal 4 diatur bahwa ada syarat bagi si pria

untuk melakukannya.⁸ Syarat tersebut antara lain harus mendapatkan izin pengadilan setempat, kemudian si istri tidak dapat melahirkan keturunan, tidak bisa melakukan kewajiban sebagai seorang istri, serta memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kalaupun kemudian semua syarat itu terpenuhi, dalam pasal 5 juga diatur bahwa pernikahan tersebut juga harus mendapat izin sang istri. Selain itu, ada kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan istri dan anak mereka, serta suami bisa berlaku adil kepada istri dan anak-anak mereka. Persyaratan inilah yang harus dipenuhi oleh pria-pria yang akan menikah lagi.

Namun karena dirasa sulit dan merepotkan, banyak pria yang demi untuk menikah lagi, pada akhirnya membuat keterangan palsu atau menikah kucing-kucingan. Inilah yang menurut Dadang menjadi alasan haramnya nikah siri. Ia menilai fenomena nikah siri yang kini terjadi di masyarakat Indonesia sudah disalahgunakan. "Sekarang ini nawaitu-nya (niat) sudah benar-benar salah. Mereka yang menikah untuk yang istri kedua, dan seterusnya sebagian besar menikah dengan alasan hawa nafsunya," ujar Dadang.⁹

Berbeda dengan Dadang Hawari, KH Tochri Tohir berpendapat lain. Ia menilai pernikahan siri halal, karena Islam tidak pernah mewajibkan sebuah pernikahan harus dicatatkan secara negara. "Nikah siri itu sah-sah saja dan halal," ujarnya. Menurut Tohir, pernikahan siri harus dilihat dari sisi positifnya, yaitu

⁸Repubik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 dan 4.

⁹Cipluk (Blogger), *Nikah Siri: Jalan Pintas Pengecut Para Maling*, (5 Desember 2015).

upaya untuk menghindari zina. "Daripada selingkuh atau berzina, lebih baik dinikahkan secara sah."¹⁰

Pernikahan syiri dari awal proses dan niat melakukannya saja merupakan tindakan kekerasan terhadap perempuan karena tidak adanya penghargaan, hak-hak yang selayaknya diterima oleh calon pengantin perempuan apalagi sampai dilakukan, efek negatifnya akan dirasakan sepanjang hidup apalagi bila sampai mempunyai anak. Tidak ada keuntungan dan dampak positif bagi perempuan yang menikah syiri kecuali dia siap mengorbankan dirinya untuk menderita selamanya demi kenikmatan sesaat hanya untuk menghalalkan hubungan sex semata.

Jika pernikahan siri dilakukan karena faktor biaya, maka negara wajib memberikan pelayanan pencatatan gratis kepada orang-orang yang tidak mampu mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan Negara. Hal ini sudah sering dilakukan seperti pernikahan masal dan pernikahan ulang para pemulung dan gelandangan.

Negara dalam menangani kasus nikah syiri ini sangat tegas, dengan tidak adanya celah bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum. Bahkan Departemen Agama sudah menyerahkan RUU Peradilan Agama Tentang Perkawinan yang membahas nikah siri, poligami dan kawin kontrak kepada Presiden. Dalam RUU tersebut jika melakukan nikah siri akan dipidanakan. Yaitu kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal 5 juta, dimana sanksi juga berlaku bagi pihak yang

¹⁰Cipluk (Blogger), *Nikah Siri: Jalan Pintas Pengecut Para Maling*, (5 Desember 2015).

mengawinkan atau yang dikawinkan secara nikah siri, poligami, maupun nikah kontrak.



BAB IV
AKIBAT HUKUM KAWIN SIRI DAN KEDUDUKAN
HARTA BERSAMA

A. Akibat Hukum Kawin Siri

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang populer di kalangan masyarakat, yaitu kawin siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti ‘kawin bawah tangan’, ‘kawin siri’ atau ‘nikah sirri’, adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam). Istilah *sirri* berasal dari bahasa arab *sirra*, *israr* yang berarti rahasia. Kawin siri, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia.¹

1. Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan:

a. Pernikahan tanpa wali.

Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat;

¹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet ke VIII (Jakarta : Hidakarya agung, 1979), h. 176.

- b. Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya;

- c. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu;

misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

2. Landasan Terkait Catatan Pernikahan²

- a. Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, bukti yang dianggap sah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan

²ASM. Saifudin H.U, *Membangun Keluarga Sakinah* (Banten: Amal Actual Perpustakaan Daerah, 2002), h. 35.

pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.

- b. Jika pernikahan siri dilakukan karena faktor biaya; maka pada kasus semacam ini negara tidak boleh mempidanakan dan menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada pelakunya.

3. Nikah Sirih Menurut Hukum Negara

RUU Nikah Sirih atau Rancangan Undang-Undang Hukum Materil oleh Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang akan mempidanakan pernikahan tanpa dokumen resmi atau yang biasa disebut sebagai nikah siri, kini tengah memicu kontroversi ditengah-tengah masyarakat.

Pasal 143 Rancangan Undang-Undang

Pasal 143 RUU yang hanya diperuntukkan bagi pemeluk Islam ini menggariskan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp6 juta hingga Rp12 juta. Selain kawin siri, draft RUU juga menyinggung kawin mutah atau kawin kontrak.³

Pasal 144 Rancangan Undang-Undang

Pasal 144 menyebut, setiap orang yang melakukan perkawinan mutah dihukum penjara selama-lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antar dua orang yang berbeda

³Rancangan Undang-Undang Hukum Materil oleh Peradilan Agama Pasal 143.

kewarganegaraan). Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarga negara asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp500 juta.⁴

Adapun fakta pernikahan siri kedua, yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda; yakni:

- (1) Hukum pernikahannya; dan
- (2) Hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara

Dari aspek pernikahannya, nikah siri tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiyatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiyatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akherat, ketika perbuatan tersebut terkategori “mengerjakan yang haram” dan “meninggalkan yang wajib”. Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiyatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat.⁵

Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang berhukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiyatan; sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akherat. Untuk itu, seorang qadli tidak boleh menjatuhkan sanksi

⁴Rancangan Undang-Undang Hukum Materil oleh Peradilan Agama Pasal 144.

⁵Hasan Ali M, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), th.

kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, dan mubah; atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh.

Berdasarkan keterangan dapat disimpulkan; pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah swt. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut;

- (1) Wali,
- (2) Dua orang saksi, dan
- (3) Ijab qabul.

Jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil.

B. *Kedudukan Harta Bersama Kawin Siri*

Pernikahan yang merupakan ikrar dua insan manusia untuk hidup bersama, sepatutnya menjadi sebuah sarana bagi keduanya untuk mereguk kebahagiaan hidup yang lebih mendalam. Namun yang namanya kehidupan di mana sangat banyak drama terlakon didalamnya, tidak jarang kita melihat perkawinan justru menjadi sebuah tempat di mana orang begitu tersiksa ketika berada didalamnya, yang berujung pada kesepakatan untuk tidak melanjutkannya. Pernikahan agar dapat diakui oleh negara harus dicatat oleh lembaga yang berwajib, namun seringkali pula kita mendengar adanya 'pernikahan dibawah tangan' ataupun "nikah siri", yang mana kedua insan menikah hanya secara agama ataupun adat, namun tidak

mendaftarkannya ke pemerintah dalam hal ini ke KUA ataupun kantor catatan sipil. Belakangan, sedang ramai diperbincangkan adanya seorang pejabat pemerintah yang melakukan nikah siri dan kemudian menceraikan si istri dalam hitungan hari setelah dinikahi.⁶

Pernikahan di Indonesia diatur dalam UU perkawinan no.1 tahun 1974. Di dalam UU diatur tentang apa saja syarat suatu perkawinan dianggap sah, dan bagaimana untuk menyelesaikan sengketa waris apabila terjadi perceraian baik itu cerai hidup maupun cerai mati. Mengapa juga perkawinan yang notabene urusan pribadi seseorang harus diatur dengan UU. UU ini tidak akan mengatur bagaimana sebuah keluarga menjalani bahtera rumah tangganya, namun lebih pada mengatur dan memberikan solusi apabila terjadi sengketa waris dan pembagian harta karena perceraian, baik itu cerai hidup maupun cerai mati. Selain UU ini yang biasa disebut hukum positif, ada juga hukum dan aturan perkawinan berdasarkan agama maupun adat istiadat yang dianut oleh si pengantin. Hukum agama dan adat inilah yang kemudian menjadi solusi bagi orang-orang yang ingin melakukan nikah siri.⁷

Dalam hukum negara sendiri, suatu pernikahan baru dianggap sah apabila tercatat di Kantor urusan agama bagi penganut muslim, dan di kantor catatan sipil bagi yang non muslim. Jadi orang-orang yang menikah secara siri ataupun diam-

⁶Ady Nugroho, *Nikah Siri Hartanya Jadi Hak Siapa?* (12 Juni 2012) <http://economy.okezone.com/read/2012/12/06/315/728189/nikah-siri-hartanya-jadi-hak-siapa> (6 Desember 2015).

⁷Ady Nugroho, *Nikah Siri Hartanya Jadi Hak Siapa?* (6 Desember 2015).

diam, mereka hanya sah menikah secara agama ataupun adat, tidak didaftarkan di KUA atau kantor catatan sipil dengan berbagai macam alasan.

Adapun efek yang terjadi apabila pasangan menikah secara siri:⁸

1. Efek pertama, adalah bila sepasang pria dan wanita yang belum menikah kemudian melakukan pernikahan siri dan memiliki anak, maka anak tersebut oleh negara akan berstatus sebagai anak diluar nikah. Anak dengan status ini hanya memiliki hak waris dari ayah biologisnya apabila si ayah di depan pengadilan mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Bila keadaannya seorang laki-laki yang sudah berkeluarga lalu memiliki istri muda yang dinikahi secara siri, maka bila si istri muda tersebut melahirkan maka anaknya menurut hukum negara disebut sebagai anak zina, yang efeknya adalah si anak tidak bisa menjadi ahli waris dari bapak biologisnya, namun memiliki hak untuk dinafkahi.
2. Efek kedua, adalah apabila terjadi perceraian seperti yang dialami oleh pejabat tersebut, maka si istri secara hukum negara tidak berhak untuk menuntut hak pembagian harta gono-gini, karena pernikahan mereka oleh negara dianggap tidak pernah terjadi. Walaupun si mantan suami berbaik hati memberikan sejumlah uang kepada mantan istrinya, itu hanya sekadar tali asih ataupun sumbangan, yang besarnya mungkin tidak seberapa. Bandingkan dengan seandainya pernikahan tersebut sah secara hukum negara, maka harta gono-

⁸Ady Nugroho, *Nikah Siri Hartanya Jadi Hak Siapa?* (6 Desember 2015).

gini yang menjadi hak si istri adalah setengah dari kekayaan mereka setelah menikah.

Jadi sebenarnya masalah pembagian harta gono-gini maupun harta warisan sebagai akibat dari adanya perkawinan akan bisa lebih simpel apabila orang-orang yang terkait didalamnya dapat membuat kesepakatan dalam pembagiannya hartanya. Undang-undang perkawinan tersebut baru digunakan apabila tidak didapatkan ketidaksepakatan dan perselisihan dalam pembagiannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bahasan yang telah di urai dalam skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, dalam hukum Islam kawin siri tetap sah dimata agama apa bila syarat dan rukun terpenuhi diantara kedua bela pihak. Lain halnya dengan Undang-Undang Perkawinan yang secara jelas telah mengatur aturan pernikahan dalam artian pencatatan pernikahan dan secara hukum positif/ Undang-Undang perkawinan, kawin siri tidak sah karena tidak terdaftar dalam pencatatan perkawinan/pernikahan.
2. Akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan harta bersama, Jika dilihat dari RUU nikah siri atau Rancangan Undang-Undang Hukum Materil oleh Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang akan memidanakan pernikahan tanpa dokumen resmi atau biasa disebut dengan kawin siri, sehingga dalam kedudukan harta bersama Negara tidak berhak mengatur pembagiannya dikarenakan tidak tercatatnya dalam pencatatan pernikahan, namun dalam pembagian harta bersama tetap bisa terlaksana dengan syarat membuat kesepakatan dalam pembagiannya hartanya.

B. Implikasi Penelitian

1. Menghendaki adanya pengawasan terhadap perkawinan sehingga tidak terlalu banyak terjadinya perkawinan siri, meskipun dalam hukum Islam di pandang tetap pernikahan yang sah namun di mata hukum kita tidak sah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada masyarakat agar mengerti betapa pentingnya pernikahan yang secara legal sebab akan berdampak pada masa depan mereka yang akan menikah/kawin nantinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Mesir: Darul Fiqr, 1347 H.
- Abdullah, Boedi, Cs, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1 Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.
- Ady Nugroho, *Nikah Siri Hartanya Jadi Hak Siapa?* (12 Juni 2012) <http://economy.okezone.com/read/2012/12/06/315/728189/nikah-siri-hartanya-jadi-hak-siapa> (6 Desember 2015).
- Ali M, Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003, th.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arisuparli, *Nikah Sirih Sah Apabila Syarat dan Rukun Terpenuhi* (6 Oktober 2013), <https://arisuparli.wordpress.com/2013/10/06/nikah-siri-sah-apabila-sarat-dan-rukun-nikah-tearpenuhi/> (5 Desember 2015).
- Cipluk (Blogger), *Nikah Siri: Jalan Pintas Pengecut Para Maling* (8 Februari 2012), <http://cempebule.blogspot.co.id/2012/02/nikah-siri-jalan-pintas-pengecut-para.html> (5 Desember 2015).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, Cet. I; Jakarta PT Gramedi Pustaka, 2008.
- Depdikbud, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Gassing, Qadir, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian)*. Edisi Refisi, Cet. I; Makassar : Alauddin Press, 2013.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Grup Syariah Metro, *Kumpulan Makalah Pendidikan Dan Tempat Berbagi Ilmu Pengetahuan* (2012), <http://grupsyariah.blogspot.co.id/2012/04/kajian-hukum-islam-tentang-hukum-nikah.html>. (5 Desember 2015).

H.U, ASM. Saifudin, *Membangun Keluarga Sakinah*, Banten: Amal Actual Perpustakaan Daerah, 2002.

<http://abidinsuccesmen.blogspot.com/2011/01/makalah-harta-benda-dalam-perkawinan.html> <http://muji-ennal.blogspot.co.id/2012/05/kedudukan-harta-dalam-perkawinan.html#sthash.3Onq26Tv.dpuf> (5 Desember 2015).

<http://pustakamawar.wordpress.com>

http://www.islam-yes.com/harta_benda.htm#sthash.3Onq26Tv.dpuf.

Kelib, Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden no 1 tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional*- Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 16 Januari 1993.

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Cet. I; Bandung: Syamsil al-Qur'an, 2012.

Kesimpulan penelitian Ananda Mutiar, *Perkawinan Siri di Mata Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukumnya terhadap isteri dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri* (Jakarta: UI Pres, Tesis, 2008), th.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Sampai dengan pasal 9 yang mengatur tentang Pencatatan Perkawinan. *Pelanggaran Ketentuan Peraturan Pemerintah ini telah diatur dan dituangkan dalam Pasal 45. Lihat Saidus Syahar, Undang-undang Perkawinan dan masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari segi Hukum Islam*, Bandung : Alumni, 1981.

Muhajir, Neong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Selatan, 1998.

Nasaruddin Umar mengatakan, Presiden SBY telah menyetujui diajukannya Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama tentang Perkawinan (RUUPAP) yang mengatur sejumlah perkara yang belum ada dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Diantaranya hukum perkawinan bawah tangan atau nikah siri, perkawinan kontrak dan hukum waris untuk ahli waris kaum perempuan. Mengenai nikah siri, menurut Nasaruddin, siapapun yang menikahkan atau menikah tanpa dicatatkan dikenai sanksi pidana 3 bulan penjara dan denda Rp 5 juta. Sedangkan penghulu yang menikahkannya mendapat sanksi pidana 1 tahun penjara. Pegawai Kantor Urusan Agama

(KUA) yang menikahkan tanpa syarat lengkap, juga diancam denda Rp 6 juta dan 1 tahun penjara. Lihat <http://suara-islam.com>, 22 June, 2009, UUP Dalam Bahaya!

Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: Academia dan Tafazza, 2004.

Nuruddin Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-undang No.1/1974 sampai KHI*, Cet ke III, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Rancangan Undang-Undang Hukum Materil oleh Peradilan Agama Pasal 143.

Rancangan Undang-Undang Hukum Materil oleh Peradilan Agama Pasal 144.

Repubik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 dan 4.

Republik Indonesia, *Undang-undang No.3 Tahun 2006*, Pasal 49, Tentang Peradilan Agama, Jakarta: Media center, 2006.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, Cet. II; Jakarta: Cv Karya Gemilang, 2009.

Republik Indonesia, Undang-Undang Pernikahan No 1 tahun 1974 Pasal 1

Roihan , A. Rasjid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: LibertyYogyakarta, 1989.

Tihami M. A., *Fiqh Munakahat : Kajian fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet ke VIII, Jakarta : Hidakarya agung, 1979.

Yusep, *Makalah Lengkap Tentang Hukum Nikah Sirih Dalam Pandangan Hukum Kapita Sleka Hukum Islam* (24 April 2013), <http://iusyusephukum.blogspot.co.id/2013/04/makalah-hukum-nikah-sirih-dalam.html> (5 Desember 2015).

Zainuddin bin ‘Abd al-Aziz al-Malibary, Fath al-Mu’in bin Syarh al-Qalyubi, Sermarang: Thoha Putra, t.th.

RIWAYAT HIDUP



Nama	: NURUL NOFIYANTI
TTL	: Makassar 13, November 1993
NIM	: 10100112043
Alamat	: Jln. Abubakar Lambogo No.18

Penulis mengenal pendidikan formal pertama pada tahun 1999-2005 di SD. Impres Mangkura. Di tahun 2005 penulis melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 2 Makassar, (tiga) tahun kemudian menyelesaikan SLTP tepatnya pada tahun 2008. Di tahun yang sama pula, penulis melanjutkan ke jenjang selanjutnya yakni di SMA Negeri 14 Makassar. 3 (tiga) tahun pula penulis menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 14 Makassar di tahun 2011, dalam penimbaan ilmu di tiga tahun terakhir sebelum masuk ke perguruan tinggi, penulis banyak mendapat pengalaman dan bagaimana rasanya berjuang untuk hidup.

Di tahun 2012, penulis mendaftar di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Penulis lulus di UIN Alauddin tepatnya jurusan Peradilan Agama. Rasa syukur tak henti penulis ucapkan, karena diberikan kesempatan untuk mengecap pendidikan Perguruan Tinggi di UIN Alauddin dan berharap dikemudian hari ilmu yang diberikan oleh baik dosen, maupun teman seperjuangan Jurusan Peradilan Agama dapat menjadi bekal dunia dan akhirat, terlebih dengan mengamalkannya pula. Teruntuk kedua orang tuaku beserta kakak-kakakku terima kasih atas semuanya yang kalian berikan dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.